PENGADILAN AGAMA KUDUS

LAPORAN KEUANGAN

Semester I Tahun 2019

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam

Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385

e-mail : infopakudus@yahoo.com

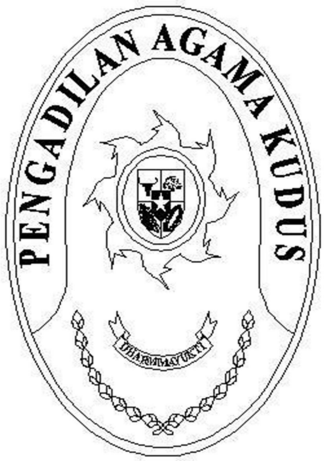

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Semester I Tahun 2019

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385

Kudus - Jawa Tengah 59321

e-mail : infopakudus@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kudus, 11 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

PENGADILAN AGAMA KUDUS

MUH. MILKHAN, S.H.

NIP. 19741228 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vi

RINGKASAN vii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ix

NERACA x

LAPORAN OPERASIONAL xi

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xii

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

A. PENJELASAN UMUM 1

A.1. Dasar Hukum 1

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus 2

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 3

A.4. Basis Akuntansi 4

A.5. Dasar Pengukuran 4

A.6. Kebijakan Akuntansi 5

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 12

B.1 Pendapatan 12

B.2 Belanja Pegawai 15

B.3 Belanja Barang 15

B.4 Belanja Modal 16

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17

B.4.3 Belanja Modal Jaringan 18

B.4.4 Belanja Modal Lainnya 18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 19
C.2 Persediaan 19
C.3 Tanah 20
C.4 Peralatan dan Mesin 22
C.5 Gedung dan Bangunan 22
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan 23
C.7 Aset Tetap Lainnya 23
C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan 23
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 24
C.10 Aset Tak Berwujud 24
C.11 Aset Lain–Lain 25
C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 26
C.13 Utang kepada Pihak Ketiga 26
C.14 Uang Muka dari KPPN 26
C.15 Ekuitas 27
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 28
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 28
D.2 Beban Pegawai 28
D.3 Beban Persediaan 29
D.4 Beban Barang dan Jasa 29
D.5. Beban Pemeliharaan 30
D.6 Beban Perjalanan Dinas 30
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 31
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 32
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 32

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 33
E.1 Ekuitas Awal 33
E.2 Defisit LO 33
E.3 Koreksi Nilai Persediaan 33
E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap 33
E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 33
E.6 Koreksi Lain-lain 33
E.7 Transaksi Antar Entitas 34
E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 34
E.7.2 Transfer keluar 34
E.8 Ekuitas Akhir 34
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 35
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 35
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 35
F.3. Pengungkapan Lain-Lain 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 12
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018 13
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019 13
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2017 14
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 15
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018 16
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 16
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018 17
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018 17
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2019 dan TA 2018 18
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018 18
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 19
Tabel 13. Rincian Persediaan 20
Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2019 21
Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 24
Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 26
Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 28
Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 29
Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 29
Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 30
Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 30
Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 31
Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 31
Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 32
Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 32

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385 e-mail : infopakudus@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2019 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kudus, 11 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

MUH. MILKHAN, S.H.

NIP. 19741228 200312 1 001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2019 adalah sebesar Rp.1.788.260.271,00 atau mencapai 39,58 persen dari alokasi anggaran sebesar 4.518.334.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.18.910.204.842,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.27.390.500,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.18.880.976.842,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.1.837.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 dan Rp.18.885.204.842,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.1.935.965.697,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 1.935.965.697,00,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.250.000,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp.1.935.715.697,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp.19.031.065.768,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 1.935.715.697,00, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.1.594.500,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.788.260.271,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp.18.885.204.842,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2019			30 JUNI 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2.	3.656.431.000,00	1.496.392.918,00	40,92	3.374.991.000,00	1.862.431.152,00	55,18
2. Belanja Barang	B.3.	811.903.000,00	291.867.353,00	35,95	718.003.000,00	382.386.668,00	53,26
3. Belanaj Modal	B.4.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		**4.518.334.000,00**	**1.788.260.271,00**	**39,58**	**4.142.994.000,00**	**2.244.817.820,00**	**54,18**

NERACA

PENGADILAN AGAMA KUDUS
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2019	31 DESEMBER 2018
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	25.000.000	-
Persediaan	C. 2	2.390.500	1.594.500
Jumlah Aset Lancar		**27.390.500**	**1.594.500**
Aset Tetap			
Tanah	C. 3	13.325.572.000	13.325.572.000
Peralatan dan Mesin	C. 4	1.765.464.685	1.765.464.685
Gedung dan Bangunan	C. 5	5.419.380.000	5.419.380.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 6	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 7	6.170.678	6.170.678
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 8	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 9	(1.635.610.521)	(1.480.274.735)
Jumlah Aset Tetap		**18.880.976.842**	**19.036.312.628**
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 10	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-lain	C. 11	5.528.800	5.528.800
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 12	(8.591.300)	(7.978.800)
Jumlah Aset Lainnya		**1.837.500**	**2.450.000**
JUMLAH ASET		**18.910.204.842**	**19.040.357.128**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 13	-	9.291.360
Uang Muka dari KPPN	C. 14	25.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**25.000.000**	**9.291.360**
JUMLAH KEWAJIBAN		**25.000.000**	**9.291.360**
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15	18.885.204.842	19.031.065.768
JUMLAH EKUITAS		**18.885.204.842**	**19.031.065.768**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**18.910.204.842**	**19.040.357.128**

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN OPERASIONAL
30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0
PENDAPANA NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		0	0
PENDAPATAN HIBAH		0	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	0	0
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	1.496.392.918	1.862.431.152
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	7.513.000	6.846.500
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	191.787.976	180.477.734
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	55.563.517	160.206.475
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	28.760.000	26.620.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	155.948.286	149.100.786
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	D. 8	0	0
JUMLAH BEBAN		1.935.965.697	2.385.682.647
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.935.965.697)	(2.385.682.647)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		272.000	2.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22.000	33.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		250.000	(31.000)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	250.000	(31.000)
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(1.935.715.697)	(2.385.713.647)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	**E. 1**	**19.031.065.768**	**10.639.644.232**
SURPLUS/DEFISIT LO	E. 2	- 1.935.715.697	- 2.385.713.647
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		1.594.500	8.646.873.022
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	1.594.500	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4	-	8.646.873.022
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	-	-
Koreksi Lain-lain	E. 6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 7	1.788.260.271	2.244.817.820
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		- 145.860.926	8.505.977.195
EKUITAS AKHIR	**E. 8**	**18.885.204.842**	**19.145.621.427**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG".

yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Kudus sebagai Visi dan Misinya

Visi Pengadilan Agama Kudus : Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif dan mendapatkan kepercayaan masyarakat Kudus, profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Agama Kudus :

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peradilan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen bebas dari praktek KKN.
3. Mengembangkan penerapan managemen modern dalam pengawasan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor serta pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Langkah Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Urusan Administrasi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kudus telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Semester I Tahun 2019	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.656.431.000	3.656.431.000
Belanja Barang	734.203.000	811.903.000
Belanja Modal	25.000.000	50.000.000
Jumlah Belanja	4.415.634.000	4.518.334.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp.0,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni Tahun 2019		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
425991	Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		0	0	0,00
Pengembalian		0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		0	0	0,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2019 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 dan 2018 tidak terdapat pendapatan pada Pengadilan Agama Kudus.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA. 2019	TA.2018	Kenaikan(Penurunan)	
				Rp	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		0	0	0,00	0,00

Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp.1.788. 260.271,00.

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Kudus pada periode 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.788.260.271,00 atau 39,58% dari anggaran belanja sebesar Rp.4.518.334.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.656.431.000	1.496.394.402	40,93
52	Belanja Barang	811.903.000	291.867.353	35,95
53	Belanja Modal	50.000.000	0.00	0,00
Jumlah Belanja Bruto		4.518.334.000	1.788.261.755	39,58
Pengembalian Belanja		-	(1.484)	0,00
Jumlah Belanja Netto		4.518.334.000	1.788.260.271	39,58

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

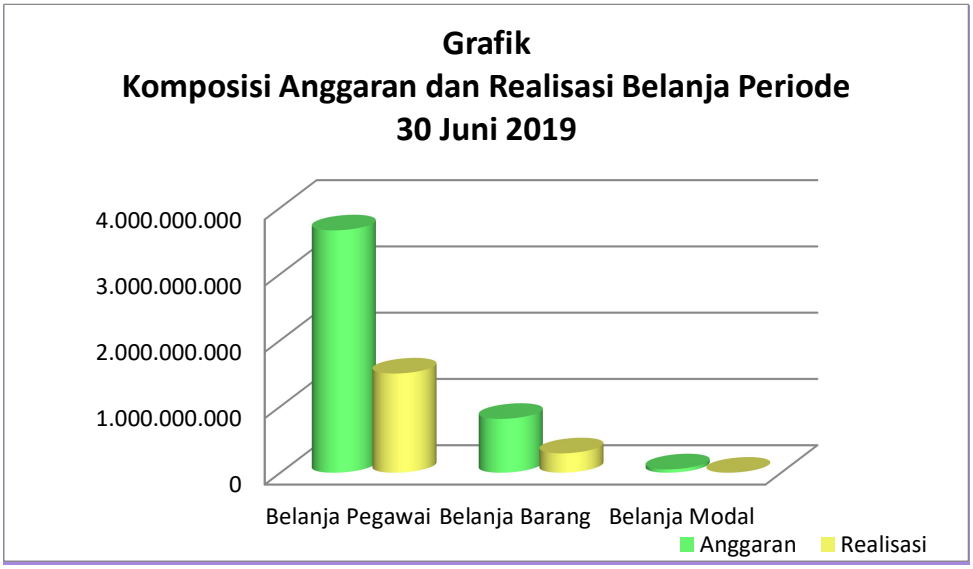

Realisasi belanja periode 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.366.036.876,00 atau sebesar 19,65% dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		30 Juni 2019	30 Juni 2018	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	1.496.392.918	1.862.431.152	(366.036.876)	(19,65)
52	Belanja Barang	291.867.353	382.386.668	(90.519.315)	(23,67)
53	Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0,00
Jumlah Belanja Netto		1.788.260.271	2.244.817.820	(456.557.549)	(20,34)

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp.1.496.392. 918.,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.496.392.918,00 dan Rp.1.862.431.152,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.366.038.234,00 atau 19,65% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	564.979.880	647.363.500	(82.383.620)	(12,73)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.015	8.038	(23)	(0,29)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	42.302.040	50.811.280	(8.509.240)	(16,75)
Belanaj Tunj.Anak PNS	13.246.980	14.193.546	(946.566)	(6,67)
Belanja Tunj.Struktural PNS	18.200.000	18.200.000	-	-
Belanja Tunj.Fungsional PNS	673.045.000	899.990.000	(226.945.000)	(25,22)
Belanaj Tunj.PPh PNS	84.708.227	111.812.774	(27.104.547)	(24,24)
Belanja Tunj.Beras PNS	25.564.260	30.199.140	(4.634.880)	(15,35)
Belanja Uang Makan PNS	72.340.000	88.593.000	(16.253.000)	(18,35)
Belanja Tunj.Umum PNS	2.000.000	1.260.000	740.000	58,73
Realisasi Belanja Bruto	**1.496.394.402**	**1.862.431.278**	**(366.036.876)**	**(19,65)**
Pengembalian	**(1.484)**	**(126)**	**(1.358)**	**1.077,78**
Realisasi Belanja Netto	**1.496.392.918**	**1.862.431.152**	**(366.038.234)**	**(19,65)**

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang Rp.291.867.353,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.291.867.353,00 dan Rp.382.386.668,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp.90.519.315,00 atau 23,67% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena pada pertengahan semester I tahun 2019 terdapat tambahan anggaran dari pusat berupa pagu tambahan langganan internet (BA BUN) yang belum dapat terealisasi karena diperlukan adanya koordinasi dengan pejabat pengadaan dan pihak terkait dalam proses pelaksanaannya sampai dengan akhir periode semester I tahun 2019.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanaj Barang Operasional	159.207.600	155.474.200	3.733.400	2,40
Belanja Barang Non Operasional	6.680.000	1.625.000	5.055.000	311,08
Belanja Barang persediaan	6.464.500	7.518.000	(1.053.500)	(14,01)
Belanaj Jasa	41.871.736	30.942.993	10.928.743	(35,32)
Belanja Pemeliharaan	55.563.517	160.206.475	(104.642.958)	(65,32)
Belanja Perjalanan Dinas	22.080.000	26.620.000	(4.540.000)	(17,05)
Realisasi Belanja Bruto	**291.867.353**	**382.386.668**	**(90.519.315)**	**(23,67)**
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	**291.867.353**	**382.386.668**	**(90.519.315)**	**(23,67)**

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal Rp.0,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena pada periode yang sama belanja modal sampai dengan akhir semester I masih belum dapat teralisasi karena masih dalam proses pengadaan dan pengiriman barang.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	**0**	**0**	**0**	**-**
Pengembalian	**0**	**0**	**0**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**0**	**0**	**0**	**-**

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2018.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengadaan	0	0	0	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	**0**	**0**	**0**	**-**
Pengembalian	**0**	**0**	**0**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**0**	**0**	**0**	**-**

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	**0**	**0**	**0**	**-**
Pengembalian	**0**	**0**	**0**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**0**	**0**	**0**	**-**

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	**0**	**0**	**0**	**-**
Pengembalian	**0**	**0**	**0**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**0**	**0**	**0**	**-**

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	**0**	**0**	**0**	**-**
Pengembalian	**0**	**0**	**0**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**0**	**0**	**0**	**-**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.25.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 dan Rp.0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.25.000.000,00 atau 100,00%. Hal ini dikarenakan Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya melalui mekanisme SP2D Nihil dengan nomor 181291701000306 dan 181291701000307 tanggal 31 Desember 2018 dan SSBP pengembalian sisa UP dengan Nomor NTPN 171A68G3DPGBKSM2 tanggal 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember TA 2018
1.	**Uang Persediaan per 30 Juni 2019**	**25.000.000,00**	**0,00**
	Jumlah	**25.000.000,00**	**0,00**

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	7.349.798
2	Uang Tunai di Brankas	17.727.002
3	Uang di Rekening Bank	-
	Total	**25.076.800**
	Pajak	(76.800)
Kas di Bendahara Pengeluaran		**25.000.000**

C.2 Persediaan

Persediaan Rp.2.390.500,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.2.390.500,00 dan Rp.1.594.500,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.796.000,00 atau 49,92%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	Mutasi	30 Juni 2019
1	Barang Konsumsi	1.594.500	796.000	2.390.500
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		1.594.500	796.000	2.390.500

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik Persediaan sesuai Berita Acara opname Fisik No. W11-A16/1219/PL.01/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019

C.3 Tanah

Tanah

Rp13.325.572.000,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Badan Urusan Administrasi per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.13.325.572.000,00 dan Rp.13.325.572.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	**13.325.572.000**
Mutasi Tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	**13.325.572.000**

Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2019

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 005, Tanggal 21 Juli 2009	Jl. Raya Kudus-Pati Km.04 Dersalam Kudus 59321	Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI	3.172	Rp 4.071.450.000

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp.1.765.464.685,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.1.765.464.685,00 dan Rp.1.765.464.685,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan, karena pada periode yang sama belanja modal Pengadilan Agama Kudus masih blm dapat terealisasi.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2018	**1.765.464.685**
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo Per 30 Juni 2019	**1.765.464.685**
Akumulasi Penyusutan	1.395.962.427
Nilai Buku	**369.502.258**

C.5 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp.5.419.380.000,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.5.419.380.000,00 dan Rp.5.419.380.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2018	**5.419.380.000**
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo Per 30 Juni 2019	**5.419.380.000**
Akumulasi Penyusutan	239.648.094
Nilai Buku	**5.179.731.906**

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2018	**0**
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo Per 30 Juni 2019	**0**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	**0**

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp.6.170.678,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.6.170.678,00 dan Rp.6.170.678,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2018	**6.170.678**
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo Per 30 Juni 2019	**6.170.678**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	**0**

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2018	**0**
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo Per 30 Juni 2019	**0**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	**0**

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.1.635.610.521,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp.1.635.610.521,00 dan Rp.1.480.274.735,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.155.335.786,00 atau 10,49%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.765.464.685	(1.395.962.427)	369.502.258
2	Gedung dan Bangunan	5.419.380.000	(239.648.094)	5.179.731.906
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	6.170.678	-	6.170.678
Jumlah		**7.191.015.363**	**(1.635.610.521)**	**5.555.404.842**

C.10 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.4.900.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.4.900.000,00 dan Rp.4.900.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Urusan Administrasi berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2018	**4.900.000**
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo Per 30 Juni 2019	**4.900.000**
Akumulasi Penyusutan	3.062.500
Nilai Buku	**1.837.500**

C.11 Aset Lain–Lain

Aset Lain-Lain Rp.5.528.800,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.5.528.800,00 dan Rp.5.528.800,00, tidak terjadi penurunan maupun kenaikan nilai aset lain-lain per 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Kudus serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2018	**5.528.800**
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo Per 30 Juni 2019	**5.528.800**
Akumulasi Penyusutan	5.528.800
Nilai Buku	**0**

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.8.591.300,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp.8.591.300,00 dan Rp.7.978.800,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.612.500,00 atau 7,67%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	4.900.000	(3.062.500)	1.837.500
2	Aset Lain-lain	5.528.800	(5.528.800)	0
Jumlah		**10.428.800**	**(8.591.300)**	**1.837.500**

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp.0,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.9.291.360,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	NIHIL		

C.14 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN Rp.25.000.000,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.15 Ekuitas

Ekuitas Rp.18.885.204.842,00

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.18.885.204.842,00 dan Rp.19.031.065.768,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp.0,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		0	0	0
Pendapatan Lain-lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan	0	0	0
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain		0	0	0
Total		**0**	**0**	**0**

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp.1.496.392.918,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.496.392.918,00 dan Rp.1.862.431.152,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Belanja Gaji Pokok PNS	564.979.880	647.363.500	(12,73)
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.531	7.912	(17,45)
3	Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	42.302.040	50.811.280	(16,75)
4	Belanaj Tunj.Anak PNS	13.246.980	14.193.546	(6,67)
5	Belanja Tunj.Struktural PNS	18.200.000	18.200.000	0
6	Belanja Tunj.Fungsional PNS	673.045.000	899.990.000	(25,22)
7	Belanaj Tunj.PPh PNS	84.708.227	111.812.774	(24,24)
8	Belanja Tunj.Beras PNS	25.564.260	30.199.140	(15,35)
9	Belanja Uang Makan PNS	72.340.000	88.593.000	(18,35)
10	Belanja Tunj.Umum PNS	2.000.000	1.260.000	58,73
Total		**1.496.392.918**	**1.862.431.152**	**(19,65)**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp.7.513.000,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.7.513.000,00 dan Rp.6.846.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	7.513.000	6.846.500	9,73
2	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		**7.513.000**	**6.846.500**	**9,73**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp.191.787.976,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.191.787.976,00 dan Rp.180.477.734,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	110.809.100	124.248.700	(10,82)
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.274.000	1.633.500	39,21
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.000.000	16.000.000	0
4	Beban Barang Operasional Lainnya	28.366.000	11.868.000	139,01
5	Beban Bahan	0	1.625.000	(100,00)
6	Beban Langganan Listrik	33.605.062	24.065.112	39,64
7	Beban Langganan Telepon	733.814	1.037.422	(29,27)
Total		**191.787.976**	**180.477.734**	**6,27**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.55.563.517,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.55.563.517,00 dan Rp.160.206.475,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.559.000	132.499.500	(97,31)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.004.517	27.706.975	87,69
Total		**55.563.517**	**160.206.475**	**(65,32)**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.28.760.000,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.28.760.000,00 dan Rp.26.620.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	28.320.000	25.520.000	10,97
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	440.000	1.100.000	(60,00)
Total		**28.760.000**	**26.620.000**	**8,04**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.155.948.286,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.155.948.286,00 dan Rp.149.100.786,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.327.768	81.480.268	8,40
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67.008.018	67.008.018	0
Jumlah Penyusutan		**155.335.786**	**148.488.286**	**4.61**
3	Beban Amortisasi Software	612.500	612.500	0
Jumlah Amortisasi		**612.500**	**612.500**	**0**
Total		**155.948.286**	**149.100.786**	**4,59**

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNBP	0	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian lancar Tagihan TP/TGR	0	0	0
4	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total		**0**	**0**	**0**

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.250.000,00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	272.000	2.000	13.500,00
2	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(22.000)	(33.000)	(33,33)
Total		**250.000**	**(31.000)**	**(906,45)**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp.19.031.065.768,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.19.031.065.768,00 dan Rp.10.639.644.232,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO Rp.1.935.715.697,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah defisit sebesar Rp.1.935.715.697,00 dan Rp.2.385.713.647,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi NIlai Persediaan Rp.1.594.500,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.594.500,00 dan Rp.0,00

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.8.646.873.022,00.

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain Rp.0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 31 Desember 2017, berupa Temuan BPK RI Tahun 2017 yang belum selesai di Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2017	0
Total		**0**

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp.1.788.260.271,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.788.260.271,00 dan Rp.2.244.817.820,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.788.260.271
Diterima dar Entitas Lain	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
	1.788.260.271

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp.0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.1.788.260.271,00.

E.7.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,00.

E.8 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp.18.885.204.842,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.18.885.204.842,00 dan Rp.19.145.621.427,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 30 Juni 2019 pada Pengadilan Agama Kudus yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2019.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat hasil audit BPK yang harus ditindak lanjuti Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni tahun 2019

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agaa Kudus untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus

   Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

   Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 0038-01-000326-30-6 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400973 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.

   Surat ijin penerbitan persetujuan kembali rekening oleh Kepala KPPN Kudus Nomor S-355/WPB.14/KP.129/2015 tanggal 19 Maret 2015.

2. Revisi DIPA

   DIPA pada Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2019 bernomor : DIPA-005.01-2.400973/2019 tanggal 05 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp.4.415.634.000,00 (empat milyar empat ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

   a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1066.970	524111	9.600.000,00
	524113	1.320.000,00
1066.994	511111	1.073.304.000,00
	511119	22.000,00

	511121	84.134.000,00
	511122	22.893.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.803.760.000,00
	511125	337.256.000,00
	511126	66.048.000,00
	511129	198.000.000,00
	511151	34.614.000,00
	521111	223.400.000,00
	521119	16.339.000,00
	521811	20.000.000,00
	521111	24.600.000,00
	521114	3.600.000,00
	522111	100.800.000,00
	522112	12.000.000,00
	522113	1.800.000,00
	521811	1.000.000,00
	523111	122.728.000,00
	523121	83.640.000,00
	521115	38.400.000,00
	521119	12.356.000,00
	521119	3.900.000,00
	521119	9.240.000,00
	524111	49.480.000,00
005.01.02		
1071.951	532111	25.000.000,00
Total		**4.415.634.000,00**

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 29 Maret 2019)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 1, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1066.970	524111	9.600.000,00	9.600.000,00
	524113	1.320.000,00	1.320.000,00
1066.994	511111	1.073.304.000,00	1.073.304.000,00
	511119	22.000,00	22.000,00
	511121	84.134.000,00	84.134.000,00
	511122	22.893.000,00	22.893.000,00
	511123	36.400.000,00	36.400.000,00

	511124	1.803.760.000,00	1.803.760.000,00
	511125	337.256.000,00	337.256.000,00
	511126	66.048.000,00	66.048.000,00
	511129	198.000.000,00	198.000.000,00
	511151	34.614.000,00	34.614.000,00
	521111	223.400.000,00	220.320.000,00
	521119	16.339.000,00	18.689.000,00
	521811	20.000.000,00	20.000.000,00
	521111	24.600.000,00	21.420.000,00
	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
	522111	100.800.000,00	96.000.000,00
	522112	12.000.000,00	7.200.000,00
	522113	1.800.000,00	600.000,00
	521811	1.000.000,00	1.000.000,00
	523111	122.728.000,00	130.948.000,00
	523121	83.640.000,00	90.130.000,00
	521115	38.400.000,00	38.400.000,00
	521119	12.356.000,00	12.356.000,00
	521119	3.900.000,00	3.900.000,00
	521119	9.240.000,00	9.240.000,00
	524111	49.480.000,00	49.480.000,00
005.01.02			
1071.951	532111	25.000.000,00	25.000.000,00
Total		**4.415.634.000,00**	**4.415.634.000,00**

c. Revisi DIPA 2 (Tanggal 29 Mei 2019)

Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp.102.700.000,00. Yaitu Penambahan anggaran belanja barang berupa tambahan pagu anggaran langganan internet BA BUN dan Laptop BA BUN.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1066.970	524111	9.600.000,00	9.600.000,00
	524113	1.320.000,00	1.320.000,00
1066.994	511111	1.073.304.000,00	1.073.304.000,00
	511119	22.000,00	22.000,00
	511121	84.134.000,00	84.134.000,00
	511122	22.893.000,00	22.893.000,00
	511123	36.400.000,00	36.400.000,00
	511124	1.803.760.000,00	1.803.760.000,00
	511125	337.256.000,00	337.256.000,00

	511126	66.048.000,00	66.048.000,00
	511129	198.000.000,00	198.000.000,00
	511151	34.614.000,00	34.614.000,00
	521111	220.320.000,00	220.320.000,00
	521119	18.689.000,00	18.689.000,00
	521811	20.000.000,00	20.000.000,00
	521111	21.420.000,00	99.120.000,00
	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
	522111	96.000.000,00	96.000.000,00
	522112	7.200.000,00	7.200.000,00
	522113	600.000,00	600.000,00
	521811	1.000.000,00	1.000.000,00
	523111	130.948.000,00	130.948.000,00
	523121	90.130.000,00	90.130.000,00
	521115	38.400.000,00	38.400.000,00
	521119	12.356.000,00	12.356.000,00
	521119	3.900.000,00	3.900.000,00
	521119	9.240.000,00	9.240.000,00
	524111	49.480.000,00	49.480.000,00
005.01.02			
1071.951	532111	25.000.000,00	50.000.000,00
Total		**4.415.634.000,00**	**4.518.334.000,00**

d. Revisi DIPA 3 (Tanggal 27 Juni 2019)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 3, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1066.970	**524111**	9.600.000,00	9.600.000,00
	524113	1.320.000,00	1.320.000,00
1066.994	**511111**	1.073.304.000,00	1.073.304.000,00
	511119	22.000,00	22.000,00
	511121	84.134.000,00	84.134.000,00
	511122	22.893.000,00	22.893.000,00
	511123	36.400.000,00	36.400.000,00
	511124	1.803.760.000,00	1.803.760.000,00
	511125	337.256.000,00	337.256.000,00
	511126	66.048.000,00	66.048.000,00
	511129	198.000.000,00	198.000.000,00
	511151	34.614.000,00	34.614.000,00

	521111	220.320.000,00	220.320.000,00
	521119	18.689.000,00	18.689.000,00
	521811	20.000.000,00	20.000.000,00
	521111	99.120.000,00	99.120.000,00
	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
	522111	96.000.000,00	90.000.000,00
	522112	7.200.000,00	2.400.000,00
	522113	600.000,00	600.000,00
	521811	1.000.000,00	1.000.000,00
	523111	130.948.000,00	140.878.000,00
	523121	90.130.000,00	91.000.000,00
	521115	38.400.000,00	38.400.000,00
	521119	12.356.000,00	12.356.000,00
	521119	3.900.000,00	3.900.000,00
	521119	9.240.000,00	9.240.000,00
	524111	49.480.000,00	49.480.000,00
005.01.02			
1071.951	**532111**	50.000.000,00	50.000.000,00
Total		**4.518.334.000,00**	**4.518.334.000,00**

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2019.
   a. Jurnal Penyesuaian
      - Pada tanggal 18 Januari 2019 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran Yang Lalu.

4. Perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

   Tidak terdapat perbaikan transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP sampai dengan periode pelaporan keuangan per 30 Juni 2019 pada Pengadilan Agama Kudus.

5. Catatan Penting Lainnya

   Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor

W11-A16/036/KU.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Saiba dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN, serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus Nomor W11-A16/038/KU.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019. Maka Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan Saiba/PPABP dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Muh. Milkhan, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Meuthiya Athifa Arifin, SE.
Pejabat Penandatangan SPM	:	Agus Fatchurrochim Thoyib.
Bendahara Pengeluaran	:	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
Staf Keuangan-Operator SAIBA / PPABP	:	H. Abd. Zidni.
Staf Keuangan-Operator SIMAK-BMN	:	A. Choirul Anwar

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2019

KODE	URAIAN	MM	KUAN TITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2018	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PER 30 JUNI 2019	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**PERALATAN DAN MESIN**		**593**	**1.765.464.685**	**1.307.634.659**	**88.327.768**	**0**	**1.395.962.427**	**369.502.258**
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	8	231.348.328	231.348.328	0	0	231.348.328	0
3.03.03	ALAT UKUR	5	3	9.500.000	6.920.000	645.000	0	7.565.000	1.935.000
3.05.01	ALAT KANTOR	5	109	259.230.400	149.289.110	16.803.220	0	166.092.330	93.138.070
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	395	636.705.936	451.512.870	29.988.608	0	481.501.478	155.204.458
3.06.01	ALAT STUDIO	5	3	12.468.000	6.468.000	1.000.000	0	7.468.000	5.000.000
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	2	6.072.500	6.072.500	0	0	6.072.500	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	1	99.500.000	69.650.000	4.975.000	0	74.625.000	24.875.000
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	1	10.843.050	2.530.045	361.435	0	2.891.480	7.951.570
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	48	386.205.473	285.558.408	26.377.869	0	311.936.277	74.269.196
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	23	113.590.998	98.285.398	8.176.636	0	106.462.034	7.128.964
133111	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		**7**	**5.419.380.000**	**172.640.076**	**67.008.018**	**0**	**239.648.094**	**5.179.731.906**
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	6	4.977.333.000	162.238.970	61.807.465	0	224.046.435	4.753.286.565
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50	1	442.047.000	10.401.106	5.200.553	0	15.601.659	426.445.341
166112	**ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN**		**43**	**5.528.800**	**5.528.800**	**0**	**0**	**5.528.800**	**0**
3.05.01	ALAT KANTOR	5	16	2.332.800	2.332.800	0	0	2.332.800	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	26	2.784.100	2.784.100	0	0	2.784.100	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1	411.900	411.900	0	0	411.900	0
TOTAL				**7.190.373.485**	**1.485.803.535**	**155.335.786**	**0**	**1.641.139.321**	**5.549.234.164**

LAMPIRAN A.2

TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

SEMESTER I TA. 2019

No	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
														Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
2.																